

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pustaka Terdahulu

Pada penelitian ini terdapat literatur-literatur terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan yang tinggi namun tetap ada perbedaan untuk penelitian ini. Berbeda dengan studi terdahulu yang menitikberatkan pada dimensi politik dan ekonomi, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana kebijakan visa BNO berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia masyarakat Hongkong, baik secara normatif maupun institusional.

Analisis Kepentingan Inggris dalam Visa *British National (Overseas)* Sebagai Respon dari Undang-Undang Keamanan Nasional Hongkong oleh Monica Ayuningtias yang terbit pada tahun 2021. Artikel Jurnal ini menjelaskan tentang tentang Kebijakan Luar Negeri Inggris yang mengeluarkan Visa *British National Overseas* sebagai respon terhadap terjadinya pengeluaran Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok. Kebijakan ini memungkinkan warga Hongkong terutama yang berpendidikan tinggi untuk bermigrasi ke Inggris. Pengeluaran kebijakan luar negeri Inggris ini bukan hanya untuk perlindungan saja, melainkan kebijakan ini juga untuk menguntungkan Inggris untuk memenuhi kepentingan Nasional dalam bidang politik dan ekonomi serta untuk mengamankan posisi Inggris di Internasional pasca brexit.

Namun dalam artikel ini lebih fokus terhadap analisis kepentingan inggris dan belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia di Hongkong.

Kemudian terdapat artikel jurnal yang berjudul ***Colonial Hangover and Invited Migration: Hongkongers to The UK*** oleh A. K. M. Ahsan Ullah dan Muhammad Azizuddin yang terbit pada tahun 2022. Penelitian ini membahas kebijakan Inggris yang mengundang migrasi besar-besaran warga Hong Kong pasca diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok. Inggris menawarkan jalur kewarganegaraan bagi lebih dari lima juta pemegang British National dengan tujuan yang tidak hanya bersifat humaniter tetapi juga berorientasi pada kepentingan ekonomi dan geopolitik. Studi ini menyoroti

bahwa kebijakan ini muncul di tengah tantangan ekonomi Inggris akibat Brexit dan pandemi COVID-19. Kebijakan Visa *British National Overseas* dianggap sebagai manifestasi dari “warisan kolonial” yang terus mempengaruhi hubungan antara Inggris dan Hongkong. Lalu artikel jurnal ini menyoroti bahwa dengan adanya kebijakan visa *British National Overseas* ini memiliki potensi untuk menguntungkan Inggris dari segi ekonomi dari masuknya tenaga kerja terampil dan investasi yang mana sejalan dengan kepentingan Inggris pasca Brexit.

Dalam artikel jurnal ini kurang memberikan penjelasan lebih lanjut dalam dimensi Hak Asasi Manusia dan dampak kebijakan tersebut dalam kebebasan sipil Hongkong. Penelitian ini akan melengkapi analisis artikel jurnal ini dengan mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan Inggris, termasuk visa *British National Overseas* yang berkontribusi kepada perlindungan hak asasi manusia di Hongkong.

Lalu terdapat artikel jurnal oleh peneliti Ronaldo Au-Yeung dan Subaita Fairouz yang berjudul *State Responsibility: Explain the UK's exclusive citizenship provision to Hong Kong British National Overseas* yang terbit pada tahun 2022. Artikel jurnal ini membahas tanggung jawab historis negara sebagai faktor kunci dalam menjelaskan visa *British national Overseas*. Penulis dalam artikel ini berargumen bahwa Inggris memiliki kewajiban moral yang diwajibkan pada hukum internasional untuk melindungi warga yang memiliki visa *British National Overseas*, setelah terdapatnya pelanggaran yang dilakukan Tiongkok dalam perjanjian “*One Country, Two System*”.

Namun dalam artikel jurnal ini berfokus pada justifikasi internasional saja, dan kurang membahas bagaimana dampak perlindungan Hak Asasi Manusia di Hongkong dari Kebijakan visa *British National Overseas*.

Skema Visa *British National Overseas* dan Diplomasi Migrasi Inggris dengan Tiongkok oleh Monica Ayuningtyas yang terbit pada tahun 2021. Artikel jurnal ini membahas tentang kebijakan visa *British National Overseas* yang digunakan sebagai alat diplomasi oleh Inggris dalam Penelitian juga membahas bahwa kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan ekonomi. Penulis berpendapat bahwa langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen

Inggris terhadap nilai-nilai demokrasi, namun terdapat kepentingan yang ingin dicapai.

Dalam artikel jurnal ini berfokus pada diplomasi migrasi dan keuntungan ekonomi yang dapat oleh Inggris daripada dampak yang di dampak Hongkong dalam perlindungan hak asasi manusia dari Inggris.

Hong Kongers and the coloniality of British citizenship from decolonisation to 'Global Britain' oleh Michaela Benson yang terbit pada tahun 2023. Artikel Jurnal ini menjelaskan tentang pemberian Visa BNO kepada warga Hongkong adalah sebagai bentuk kolonialisme yang mana sebelumnya hongkong merupakan wilayah di bawah koloni Inggris. Kemudian membahas status pemegang visa British National Overseas pada tahun 1997 adalh bagaimana contoh Inggris Inggris yang mempertahankan hubungan kolonial melalui hukum kewarganegaraan dan migrasi dan juga kebijakan visa British National Overseas yang diberlakukan pada tahun 2021 ini adalah bentuk kelanjutan historis dimana warga Hongkong mendapat pengecualian dalam rezim imigrasi yang semakin ketat.

Dalam penelitian ini lebih berfokus kepada aspek kolonialisme dan kewarganegaraan Inggris dan kurang membahas lebih terperinci tentang dampak visa British National Overseas kepada Hongkong.

No.	Literatur	Penulis	Teori/Konsep	Bahasan
1.	<i>Britain in the Pacific: Staying the Course?</i>	Nick Childs dan Callum Frase	Konsep keterlibatan strategis dan diplomasi pertahanan	Membahas Keterlibatan strategis Inggris di kawasan Asia-Pasifik Artikel ini membahas keterlibatan strategis Inggris di Asia-Pasifik setelah kebijakan "Indo-Pacific tilt" oleh pemerintah Konservatif. Dengan Partai Buruh kini berkuasa di bawah

				PM Keir Starmer, terdapat ketidakpastian mengenai masa depan kebijakan ini, terutama mengingat keterbatasan keuangan Inggris dan komitmen NATO. Kolaborasi seperti AUKUS dan Global Combat Air Programme dianggap penting meskipun ada kekhawatiran tentang alokasi sumber daya dan komitmen militer.
2.	Pengaruh British Exit (Brexit) Terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran	Hardi Alumaza SD dan Virginia Sherin	Teori pengambilan kebijakan dan konsep imigrasi	Membahas dampak Brexit terhadap kebijakan imigrasi Inggris setelah keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa pada referendum 23 Juni 2016. Dengan lebih dari 52% suara mendukung Brexit, Inggris mendapatkan kebebasan untuk merumuskan kebijakan imigrasinya sendiri. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Theresa May, kebijakan imigrasi yang lebih ketat diadopsi, terinspirasi oleh model Australia, untuk mengurangi

				jumlah imigran. Masyarakat Inggris mendukung pembatasan ini untuk melindungi identitas nasional dan keamanan, meskipun hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan imigran terkait meningkatnya rasisme dan diskriminasi. Artikel ini menggunakan teori pembuatan kebijakan dan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari perubahan kebijakan ini, serta menekankan pentingnya hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat.
3.	Kebijakan Luar Negeri Inggris Atas Hak Tinggal Imigran Pasca Referendum Brexit Uni Eropa	Sofya Ramli	Neo Realisme	Membahas perubahan kebijakan visa Inggris setelah Brexit, yang mempengaruhi migrasi dari Uni Eropa dan negara-negara lain. Ada tiga tingkat visa: visa kerja, visa pelajar, dan visa wisata. Semua imigran kini harus memenuhi syarat yang sama, terlepas

				dari asal mereka. Kebijakan baru ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua imigran dan mendukung "Global Britain." Penelitian menunjukkan peningkatan imigran dari luar Uni Eropa dan penurunan dari Uni Eropa.
4.	Analisis Posisi Hongkong Pasca Joint Declaration 1948 Terhadap Dinamika Tiongkok-Britania Raya	Alexander Yudho Pratama	Neorealisme	Artikel oleh Alexander Yudho Pratama mengeksplorasi hubungan antara China dan Inggris terkait status administratif khusus Hongkong setelah Deklarasi Bersama 1984. Artikel ini menyoroti prinsip "satu negara, dua sistem" yang menciptakan celah hukum, memungkinkan penjahat menghindari hukum China. Menggunakan kerangka neorealis, penulis berpendapat bahwa situasi Hong Kong mencerminkan realisme defensif, di mana negara-negara mungkin bertindak agresif

				untuk meningkatkan keamanan mereka. Artikel ini mengulas sejarah transisi Hong Kong dari koloni Inggris menjadi wilayah administratif khusus, serta respons China dan Inggris terhadap ketegangan yang ada. Selain itu, artikel ini membahas tantangan yang muncul akibat perbedaan identitas dan sistem politik.
5.	Global Britain and The Indo Pacific	Valerie Andre	Role Theory	Membahas evolusi kebijakan luar negeri Inggris setelah Brexit, dengan fokus pada konsep "Global Britain" dan pergeseran strategis ke kawasan Indo-Pasifik. Artikel ini menyoroti upaya Inggris untuk mendefinisikan kembali perannya di dunia pasca-Brexit, menghadapi tantangan seperti penurunan produktivitas ekonomi dan ketegangan geopolitik. Di bawah kepemimpinan Rishi Sunak, Inggris berusaha memperbaiki

				hubungan dengan Uni Eropa dan mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis, terutama dalam memperkuat hubungan dengan sekutu seperti AS dan Jepang. Meskipun ada skeptisisme tentang kapasitas Inggris untuk memenuhi komitmennya, strategi Indo-Pasifik tampaknya mendapatkan daya tarik. Namun, tantangan tetap ada, termasuk keterbatasan anggaran dan kebutuhan akan tujuan strategis yang lebih jelas. Artikel ini juga membahas dampak dari perubahan politik domestik dan internasional terhadap kebijakan luar negeri Inggris.
6	Keterlibatan ASEAN dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)	Ipung Pramudya Setiawan & Made Selly Dwi Suryanti	Hak Asasi Manusia, Responsibility to Protect (R2P)	Menganalisis peran ASEAN dalam menangani konflik Rohingya di Myanmar pada 2017-2019. Menjelaskan bahwa ASEAN terlibat karena tanggung jawab regional untuk melindungi negara anggotanya, dengan berpegang pada prinsip HAM

				dan dibantu oleh Indonesia melalui soft diplomacy serta PBB melalui konsep R2P. Menyoroti peran tim AHA ASEAN dalam memberikan rekomendasi di Rakhine.
7	Kebijakan Jerman atas Pemberian Suaka Terhadap Pengungsi Asal Suriah Tahun 2015-2016	Hendra Maujana Saragih & Rebekka Septiana Nababan	Human Security, National Security, National Interest	Menganalisis kebijakan "Open Door Policy" Jerman di bawah Kanselir Angela Merkel dalam menerima pengungsi Suriah selama krisis pengungsi Eropa 2015-2016. Menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip kemanusiaan (human security) dan kepentingan nasional, meskipun menuai kritik dari oposisi domestik dan negara-negara Uni Eropa lainnya terkait dampak sosial, ekonomi, dan keamanan